

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Budaya Politik

Almond dan Verba (1984: 25) mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, serta sikap terhadap peranan warga negara yang ada didalam sistem tersebut.

Pada budaya politik dapat ditemukan bagaimana orientasi atau persepsi individu mengenai sistem kekuasaan, negara, pemerintah, dan orientasi mereka sebagai bagian dari negaranya. Budaya politik begitu melekat pada tiap golongan masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional, transisional, maupun masyarakat modern. Budaya politik pula berkaitan dengan perilaku politik atau tindakan manusia dalam situasi politik. Perilaku politik seseorang akan sangat dipengaruhi oleh pola orientasi yang sama, yang secara jelas mencerminkan budaya politik.

Masyarakat dari suatu negara pasti memiliki budaya politik begitu pula individu-individu yang memiliki orientasi dan persepsi terhadap sistem politiknya. Hal ini dapat terjadi pada masyarakat modern dan masyarakat tradisional, atau bahkan pada masyarakat primitif. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dalam kaitan budaya politik, individu-individu dalam masyarakat itu menilai tempat dan peranannya di dalam sistem politik. Pengertian tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu. (Sudijono, 1995: 36-37).

Dalam hal ini, Almond dan Verba memiliki pandangan tentang politik didalamnya terdapat 3 komponen, yaitu:

1. Kognitif ,komponen ini berkaitan dengan pengetahuan seseorang mengenai politik dan kepercayaannya pada politik.
2. Orientasi Afektif, komponen ini berkaitan dengan perasaan seseorang terhadap sistem politik, peranan para aktor.
3. Orientasi Evaluatif yaitu keputusan dan praduga tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Budaya politik sangat luas lingkungannya, namun demikian budaya politik juga dapat di klasifikasikan menjadi beberapa tipe budaya politik yaitu budaya politik parokial, budaya politik kaula/subjek, dan budaya politik partisipan.

a. Budaya Politik Parokial

Budaya parokial terbatas pada wilayah atau lingkup yang kecil dengan kata lain biasanya terdapat pada masyarakat tradisional dan sederhana. Dalam budaya politik ini di mana anggota masyarakat tidak menaruh minat sepenuhnya terhadap obyek dan kegiatan politik apapun kecuali terhadap obyek yang dalam skala sangat kecil. Yang nyata menonjol dalam budaya politik parokial ialah adanya kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan atau kekuasaan politik dalam masyarakatnya. (Kantaprawira, 2006:33)

Orientasi parokial menyatakan ketiadaannya harapan-harapan terhadap perubahan yang diperbandingkan dengan sistem politik lainnya. Dengan kata lain bahwa masyarakat dengan budaya parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik termasuk bagian-bagian terhadap perubahan sekalipun. Dengan demikian

parokialisme dalam sistem politik yang diterensiasi lebih bersifat efektif dan orientasi daripada kognitif.

1. Budaya Politik Kaula/Subjek

Pada budaya politik kaula anggota masyarakat sudah memiliki kesadaran, serta minat dan perhatiannya dalam sebuah sistem, terutama pada *output*. Sedangkan perhatiannya pada aspek masukan (*input*) dan juga kesadaran dalam kegiatan politik apapun sama sekali tidak ada (Kantaprawira, 2006 : 33). Budaya politik kaula ini biasanya berada pada masyarakat yang sudah beranjak maju dari tradisional. Masyarakat sudah memiliki harapan tertentu pada sistem politik, akan tetapi harapan tersebut hanya diarahkan pada kebijakan pemerintah yang dianggap baik.

Budaya politik kaula ini biasanya berada pada masyarakat tradisional yang telah berkembang peradabannya. Masyarakat sudah mempunyai harapan tertentu pada sistem politik yang ideal.

2. Budaya politik partisipan

Pada budaya partisipan ini adanya perilaku berbeda seseorang telah menyadari setiap hak dan tanggung jawabnya dan dapat pula merealisasikan serta mempergunakan hak dan kewajibannya tersebut. Masyarakat tidak menerima begitu saja keadaan, karena mereka merupakan bagian dari mata rantai aktif dalam proses politik. (Kantaprawira, 2006:34)

Dengan demikian, masyarakat dalam budaya politik partisipan tidaklah menerima begitu saja keputusan politik. Hal itu karena masyarakat telah sadar bahwa begitu kecilnya mereka dalam sistem politik, meskipun tetao memiliki

kesadaran, totalitas, masukan, keluaran dalam konstelasi sistem politik yang ada. Anggota-anggota masyarakat partisipatif diarahkan pada peranan pribadi sebagai aktivis masyarakat, meskipun sebenarnya dimungkinkan mereka menolak ataupun menerima.

Namun dalam suatu masyarakat kerap kali ditemukan inklinasi kepada salah satu tipe budaya politik, dalam budaya politik partisipan masih dapat dijumpai individu-individu yang tidak menaruh minat pada obyek-obyek politik secara luas. Menyadari realitas budaya politik yang hidup di masyarakat tersebut, Almond menyimpulkan adanya budaya politik campuran (*mixed political culture*) yang menurutnya lazim terjadi pada suatu masyarakat yang senantiasa mengalami perkembangan dan dinamika yang pesat, sehingga sistem politik bias berubah dan kultur serta struktur politik senantiasa tidak selaras. Budaya politik campuran yang dikemukakan Almond sebagai berikut:

a. Budaya Parokial Subjek

Tipe budaya politik ini yaitu saat sebagian besar penduduk menolak tuntutan-tuntutan eksklusif masyarakat suku yang feodalistik. Masyarakatnya mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih kompleks dengan struktur-struktur pemerintahan pusat yang sentralistik dan bersifat kompleks.

Apabila kebudayaan sebuah negara adalah kebudayaan politik campuran seperti itu, didalamnya terdapat banyak individu yang aktif dalam politik, tetapi banyak pula yang mengambik peranan subyek yang lebih aktif. Peranan peserta, dengan demikian telah ditentukan kedalam peranan parokial subyek. Hal itu berarti bahwa warga negara yang aktif melestarikan ikatan-ikatan tradisional dan

nonpolitik, dan peranan politiknya yang lebih penting sebagai seorang subyek. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa orientasi peserta menggeser orientasi parokial dan subyek, tetapi tanpa menyebutkan kedua peranan terakhir itu secara eksplisit (Sudijono:1995).

b. Budaya Politik Subjek-Partisipan

Proses peralihan dari budaya subjek menuju budaya partisipan yang sangat dipengaruhi oleh cara bagaimana peralihan budaya parokial menuju budaya subjek. Dalam budaya subjek-partisipan ini, sebagian besar penduduk telah memperoleh orientasi-orientasi *input* yang bersifat khusus dan serangkaian orientasi pribadi yang aktif. Sementara sebagian penduduk masih terorientasi dengan struktur kekuasaan yang otoriter dan menempatkan partisipasi masyarakat pasif. Dengan demikian, terjadi perbedaan orientasi pada masyarakat, sebagian yang cenderung mendorong proses partisipasi aktif warga negara, sebagian lain justru sebaliknya yaitu pasif (Sudijono: 1995).

c. Budaya Politik Parokial-Partisipan

Kondisi ini biasanya terjadi di dalam negara yang sedang berkembang hampir seluruh negara berkembang memiliki budaya parokial. Karenanya sistem politik mereka terancam oleh fragmentasi parokial yang tradisional, padahal mereka ingin secepatnya menjadi sebuah negara modern. Suatu masa, cenderung ke otoritarianisme dan pada waktu yang lain ke arah demokrasi. Struktur untuk bersandar tidak terdapat, sementara itu birokrasi tidak dapat berdiri atas kepentingan masyarakat, bahkan infrastrukturnya tidak berakar pada warga negara yang kompeten dan bertanggung jawab (Sudijono: 1995).

d. Budaya Parokial-Subjek-Partisipan

Civic Culture (budaya kewarganegaraan) menekankan pada partisipasi rasional dalam kehidupan politik, digabungkan dengan adanya kecenderungan politik parokial dan subyek warga negara maka menjadikan sikap-sikap tradisional dari penggabungannya dalam orientasi partisipan yang mengarah pada suatu budaya politik dengan keseimbangan aktivitas politiki, keterlibatan dan adanya rasionalitas serta kepasifan, tradisionalitas, dan komitmen terhadap nilai-nilai parokial. Singkatnya, budaya politik ini merupakan penggabungan karakteristik dari ketiga budaya politik murni (Sudijono:1995). Dalam pemahaman yang lebih sederhana, budaya politik kewarganegaraan merupakan kombinasi antar karakteristik-karakteristik aktif, rasional, mempunyai informasi yang cukup mengenai politik, kesetiaan pada sistem politik, kepercayaan dan kepatuhan terhadap pemerintah, keterkaitan pada keluarga, suku, dan agama.

B. Partisipasi Politik

Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan juga ikut dalam menentukan pemimpin baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kegiatan yang dimaksud antara lain mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal ini, partai politik memiliki fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak anggota masyarakat dengan kata lain partai politik sebagai wadah partisipasi

politik. (Subakti,2010:151)

Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat “Partisipasi politik merupakan kegiatan sukarela dari warga masyarakat mengenai bagaimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan pemimpin baik secara langsung ataupun tidak langsung, juga dalam proses pembentukan kebijakan umum (*The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rules and, directly or indirectly, in the formation of public policy*). (Prof Miriam Budiardjo. Jakarta. (2008). *Dasar – Dasar Ilmu Politik* .Hal.367 (diambil dari sebuah jurnal “Political Participation”, “*International Encyclopedia of The Social Sciences*, ed. ke-2 , XII, hlm. 252).

Maka dengan demikian, partisipasi politik berkaitan erat dengan proses perumusan negara. Dalam definisi ini memberikan gambaran mengenai keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik. *Pertama*, kegiatan-kegiatan politik yang dapat menghasilkan adanya gugatan atau tuntutan terhadap sistem politik ataupun sistem pemerintahan. *Kedua*, kegiatan-kegiatan politik yang berupa kegiatan yang mendukung adanya gagasan dan kebijaksanaan yang dihasilkan oleh sistem politik Indonesia.

Partisipasi politik sangat erat kaitannya dengan kesadaran politik, di negara-negara demokrasi ketika masyarakat memiliki partisipasi politik yang tinggi dianggap menunjukkan kesadaran masyarakat dalam memahami masalah dan sistem politik tersebut. Begitu pula ketika tingkat partisipasi masyarakat hal

tersebut dianggap bahwa banyak masyarakat tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.

Berbagai pendapat mengemukakan ketika partisipasi masyarakat rendah maka ada keresahan dalam sistem politik yang ada, dimana pemimpin dianggap kurang tanggap dalam memahami aspirasi serta tuntutan masyarakat hal tersebut menunjukkan legitimasi yang rendah.

Asal-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik atau landasan politik menurut Samuel P Huntington dan Nelson (Anggara : 2013) diantaranya:

1. Kelas merupakan individu yang memiliki latar belakang status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa.
2. Kelompok atau komunal yaitu individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa.
3. Lingkungan yaitu individu yang memiliki tempat tinggal berdekatan.
4. Partai berasal dari individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang eksekutif dan legislatif.
5. Golongan atau faksi berasal dari individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus antara satu dan lainnya, yang akhirnya membentuk hubungan *patron-client*, yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan dan ekonomi yang tidak sederajat.

Adapun berbagai bentuk partisipasi politik, meliputi kegiatan-kegiatan politik yang bersifat mendukung atau menuntut, sebagai *input* yang diajukan masyarakat

terhadap sistem politiknya yaitu bentuk partisipasi politik dan non konvensional. Bentuk partisipasi konvensional dikatakan bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Sedangkan bentuk partisipasi politik nonkonvensional misalnya seperti kekerasan petisi, revolusioner, ataupun petisi. Bentuk partisipasi dibedakan menjadi:

1. Kelompok apatis : orang yang tidak ikut andil dalam kegiatan politik apapun.
2. Spektator : orang yang setidaknya pernah ikut memilih.
3. Gladiator : komunikator, aktivis partai, pekerja kampanye.
4. Pengkritik : bentuk partisipasi tidak konvensional.

C. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Analisis Peneliti	Perbedaan Peneliti
1	Riza Faisal (2013)	<i>Budaya Politik Masyarakat Adat Kampung Naga (Studi Kasus: Di Masyarakat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya</i>	Penelitian ini dilatar belakangi mengenai pemahaman masyarakat adat Kampung Naga terhadap sistem politik yang berusaha menyaring pengaruh nilai-nilai baru demi terjaganya kelestarian	Perbedaan yang diteliti yaitu terletak pada lokasi penelitian yang diteliti

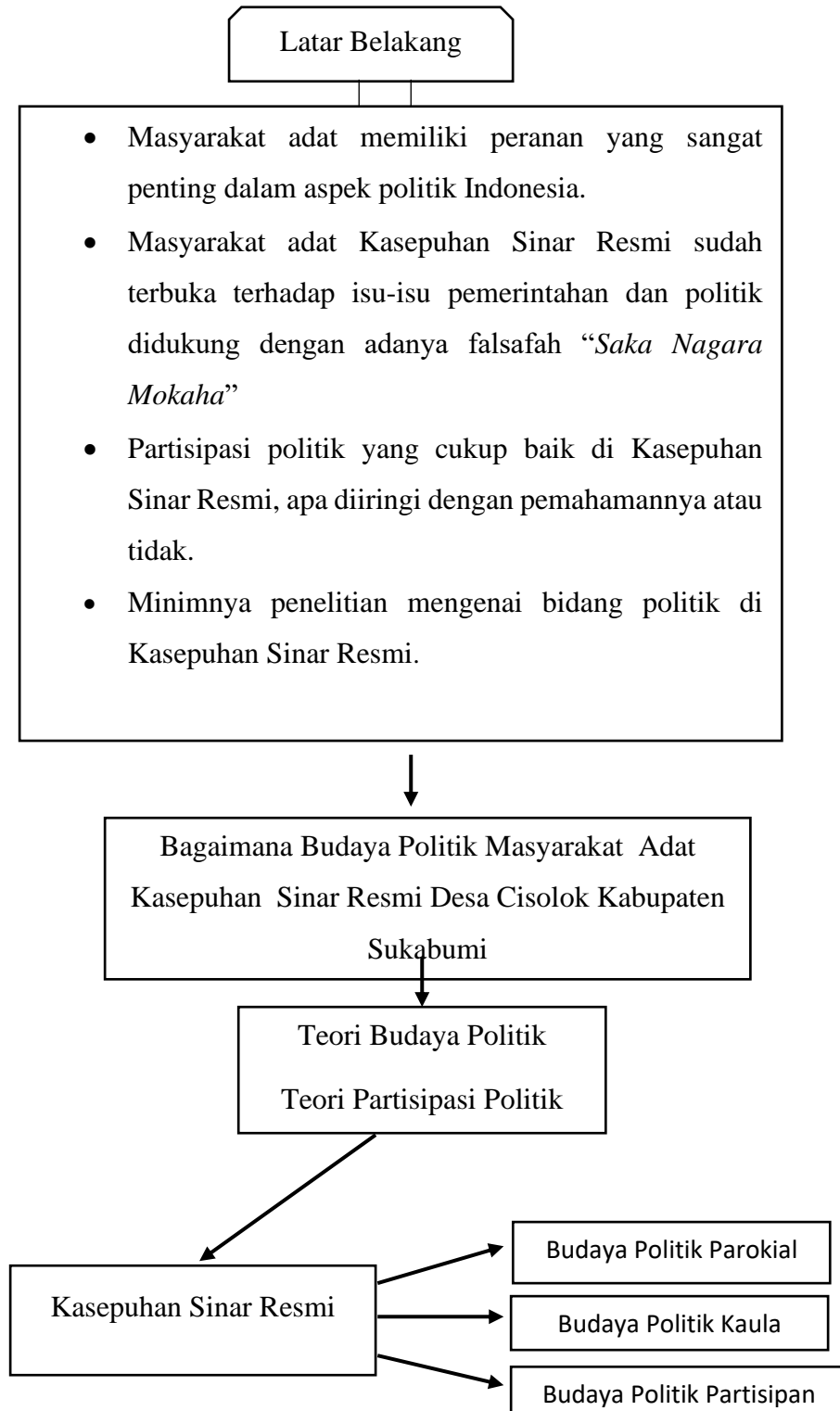
		<p><i>Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2013)</i></p>	<p>budaya nenek moyang. Namun disisi lain, letaknya yang strategis menjadikan mereka mengalami interaksi yang intensif dengan masyarakat luar. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dalam bentuk observasi, wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi.</p>	
	<p>Nia Kurniawati (2011)</p>	<p><i>Budaya Politik Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten</i></p>	<p>Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai tipe budaya politik, hubungan masyarakat, dan struktur sosial</p>	<p>Perbedaan yang diteliti yaitu terletak pada lokasi</p>

		<i>Provinsi</i> <i>Banten</i>	masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui hasil wawancara dan pengamatan. Pengumpulan data dalam bentuk observasi, wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi.	penelitian yang diteliti
3	Munadi	<i>Budaya Politik</i> <i>Masyarakat</i> <i>Samin</i>	Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tipe budaya politik,	Perbedaan yang diteliti yaitu terletak pada lokasi

		<p><i>(Sedulur Sikep)</i></p> <p><i>(Studi Kasus di Dukuh Mbombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah)</i></p>	<p>hubungan masyarakat, dan struktur sosial masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Dukuh Mbombong Desa Baturejo Kecamatan Sukililo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. .Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui hasil wawancara dan pengamatan.</p> <p>Pengumpulan data dalam bentuk observasi, wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi.</p>	<p>penelitian yang diteliti</p>
--	--	--	---	---------------------------------

D. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Dari bagan diatas dapat dijelaskan bahwa penulis tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai budaya politik masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi yang di latar belakang karena hal yang paling mendasar dalam sistem politik Indonesia yaitu budaya politik. Budaya politik masyarakat tertentu akan berbeda dengan masyarakat lainnya. Kemudian minimnya informasi dan kajian penelitian mengenai politik khususnya budaya politik di Kasepuhan Sinar resmi ini menarik untuk dikaji lebih dalam melihat fakta bahwa masyarakat disana sudah terbuka mengenai isu-isu politik maupun pemerintahan, hal ini didukung dengan adanya falsafah hidup mereka yaitu “*Saka Nagara Mokaha*”. Selain itu pula, Kasepuhan Sinar Resmi ini memiliki tingkat partisipasi yang cukup baik dalam pemilu.

Berkaitan dengan itu, masyarakat adat memiliki peranan yang sangat penting dalam aspek politik Indonesia dan juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya dalam berpolitik terlepas mereka menggunakan hak politiknya ataupun tidak.

Penulis telah merumuskan mengenai rumusan masalah yang akan dikaji lebih dalam yaitu bagaimana budaya politik masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi. Hal tersebut dikarenakan penulis mengaggap bahwa kajian mengenai budaya politik pada masyarakat adat sangat penting dan menarik untuk diketahui dan dikaji lebih dalam. Hasil dari penelitian ini akan menunjukkan bagaimana budaya politik masyarakat adat Kasepuhan Sinar

Resmi termasuk ke dalam budaya politik parokial, budaya politik kaula, atau budaya politik partisipan.

